

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Pengantar H. Jimly Asshiddiqie)*. UII Press. Yogyakarta
- Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi. 2015. *Kompilasi peerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi RI. Jakarta.
- Burhan Ashofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Cholid Narbuko. 2003. *Metodelogi penelithan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- C.S.T Kansil. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Gaussyah. *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Ssitem Ketatanegaraan Indonesia. Kemitraan Partnership*. Jakarta Selatan
- H. R. Abdussalam. 2009. *Hukum Kepolisian : sebagai hukum positif dalam disiplin hukum yang telah direvisi*. Restu Agung. Jakarta.
- Margono. 2012. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika. Jakarta.
- M. Faal. 1991. *Penyaringan perkara pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. NTB.

Muladi dan Barda Nawawi. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. PT. Alumni. Bandung.

Nurasariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Pustaka Prima. Medan

P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penintensier Indonesia*. Amrico. Bandung.

-----, 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.

R.Soesilo. 1995. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjasannya.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

## **C. JURNAL**

Anthony Simarmata dan Iyah Faniyah, 2023, "Disparity in Criminal Convictions Against Perpetrators of Criminal Acts of Circulation of Alcoholic Beverages Without Distribution Permits (Analysis of Decisions Number 125/Pid.Sus/2020/PN.Pdg and Number 245/Pid.Sus/2020/PN.Pdg)", *Ekasakti Journal of Law and Justice*, Vol.1, No.1, 2023

- Arya Bagus Wardhana, 2015, "Makna Yuridis Kegoncangan Jiwa yang Hebat dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP Berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang.
- Barry Franky Siregar, 2016, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta", *Jurnal HKI Universitas Atmajaya*, Yogyakarta.
- Bayu Pratama Yudha, Yoserwan, dan Riki Afrizal, 2023, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Kripto di Indonesia", *Lareh Law Review*, Vol. 1, No. 1, Juni 2023.
- Damanhuri Fattah, 2013, "Teori Keadilan Menurut Rawls", *Jurnal TPIs*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2013.
- Elisabeth Adisty Novena dan Hari Soeskandi, 2022, "Disparitas Putusan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif HAM", *Bureaucracy Journal:Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol.2, No. 3, September-Desember 2022.
- Fransisco Mekel, 2020, "Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP", *Lex Administratum*, Vol. 8 No. 4, 2020.
- Frengky Manurung, *Et. Al.*, 2021, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No. 159/Pid.Sus/2019/Pn.Rap dan Putusan No. 626/Pid.Sus/2020/Pn.Rap)", *Law Jurnal*, Vol.2, No.1, 2021
- Frisca Dwi Sentika, 2020, "Studi Kasus terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor:189/K/PID/2017 tentang Tindak Pidana Penganiayaan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4, No. 3, Agustus 2020
- Hasdiwanti dan Syamsuddin Radjab, 2022, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian", *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume 4 Nomor 3 November 2022.
- Hikmah Cantika Sari Anam, Rodrigo F. Elias, dan Altje A. Musa, 2022, Analisis Terjadinya Disparitas Putusan Antara PN dan PT Atas Terpidana Pinangki Sirna Malasari (Nomor Perkara:10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI), *Lex Privatum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 10, No. 2, 2022.
- Koesparmono Irsan dan Anggreany Haryani Putri, 2018, "Polisi, Kekerasan, dan Senjata Api", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Volume 12 No. 1, Juni 2018

- Naomi Sari Kristiani, Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mdn, *Sign Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020
- Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, 2018, Disparitas dalam Penjatuhan Pidana, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 47*, No.3, Juli 2018
- Sahata Manalu, 2020, “Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan”, *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, Volume 1 No. 1 September 2020
- Sutarto, 2021, Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*
- Teguh Syuhda Luis, 2017, “Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat terhadap Anak”, *Jurnal EduTech*, Vol. 3 No. 1, Maret 2017.
- Wenlly Dugair, 2016, “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) sebagai Alasan Penghapusan Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 5, 2016.
- Yoserwan, 2019, “Penanganan Tindak Pidana Anak oleh Kepolisian Melalui Diversi sebagai Perlindungan Hak Anak”, *Nagari Law Review*, Vol. 2, No. 2, April 2019.
- Zaini, 2019, “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan Conceptual Review Of Criminal And Criminal”, *Voice Justice : Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3 No. 2

#### **D. SKRIPSI**

- Joko Purnomo, 2017, Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Obyek Lelang Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor : 192/Pdt.G/2016/PN Mdn), Skripsi Universitas Medan Area, Medan.
- Nurhidayat, 2017, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”, Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar.

#### **E. PUTUSAN**

- Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN.Kbr.
- Putusan Nomor 274/PID/2021/PT.Pdg.